KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Pencabutan insentif, legislator nilai evolusi EV bakal terhambat
Tanggal : Rabu, 04 Februari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Pencabutan Insentif

Legislator Nilai Evolusi EV Bakal Terhambat

ANGGOTA Komisi XII DPR Syarif Fasha menyoroti tantangan serius terkait pencabutan tax holiday kendaraan listrik (EV). Kebijakan itu berpotensi menghambat pertumbuhan pasar dan pada akhirnya berdampak pada harga, daya beli masyarakat, serta keberlanjutan industri kendaraan listrik nasional.

Menurut Fasha, pencabutan insentif pajak berisiko memicu kenaikan harga mobil listrik yang pada akhirnya menurunkan minat konsumen. Kondisi itu berpotensi memperlambat proses transisi energi yang selama ini dibangun pemerintah secara bertahap dan terencana.

"Kalau tax holiday kendaraan listrik dicabut, harga EV naik dan pengguna akan berkurang. Artinya, evolusi EV akan terhambat," ujar Fasha di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/2/2026).

Politikus Partai NasDem itu mengatakan, dukungan Pemerintah terhadap industri kendaraan listrik tidak boleh berhenti pada aspek pendanaan semata. Keberlanjutan sektor ini sangat bergantung pada kepastian regulasi serta kesiapan infrastruktur pendukung di berbagai wilayah.

Fasha menekankan, perlu ada perpanjangan insentif pajak agar industri EV tetap memiliki ruang untuk tumbuh. Langkah itu dinilai penting untuk menopang transisi energi bersih yang membutuhkan keberpihakan kebijakan secara konsisten dan berjangka panjang.

Dia juga menyoroti pentingnya peran PT Industri Baterai Indonesia (IBC) dalam memperkuat ekosistem industri EV nasional. Keberadaan IBC dianggap jadi bagian strategis dalam mendukung hilirisasi mineral dan penguatan rantai pasok domestik.

Sejalan dengan itu, pemerataan infrastruktur pengisian daya merupakan syarat mutlak bagi perluasan pasar EV, terutama di daerah. Tanpa dukungan fasilitas yang memadai, kebijakan insentif tidak akan memberikan dampak maksimal.

"Tempat pengisian daya diperbanyak sampai tingkat SPBU. Kalau ngecas terlalu lama di tempat umum, siapa yang mau menunggu? Harus ada *super fast charger*," tegasnya.

Wakil Ketua Komisi XII DPR Putri Zulkifli Hasan menambah-



Syarif Fasha

kan, pihaknya berkomitmen mendukung pengembangan industri baterai EV nasional. PT IBC jadi bagian penting dari strategi hilirisasi mineral, khususnya nikel.

Menurutnya, keberadaan industri baterai merupakan terobosan besar dalam memperkuat daya saing nasional. "Ini adalah salah satu bentuk hilirisasi mineral kita, seiring meningkatnya penggunaan mobil listrik di Indonesia. IBC jadi breakthrough penting," ujarnya.

Legislator Fraksi PAN itu berharap, Indonesia bisa berkembang jadi pusat produksi baterai kendaraan listrik sekaligus basis electric storage system di tingkat regional maupun global. Untuk mencapai target itu, harus ada dukungan kebijakan yang konsisten dan terukur.

Dia mengingatkan, pengembangan industri baterai EV sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto terkait swasembada energi nasional. Karena itu, hilirisasi nikel jadi bagian integral dari agenda transisi dari transisi dari energi fosil menuju energi baru dan terbarukan. "Dengan meningkatnya penggunaan EV, konsumsi bahan bakar fosil bisa ditekan," jelasnya.

Lebih lanjut, kata Putri, EV tidak hanya berdampak pada sektor energi, api juga memperkuat struktur industri nasional. Karena, penguatan rantai pasok domestik akan mengurangi ketergantungan terhadap impor komponen strategis.

Deputi Bidang Infrastruktur Dasar Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Rachmat Kaimuddin menyebut, Pemerintah masih memberikan insentif yang signifikan melalui kebijakan pajak daerah dan pusat. Insentifnya cukup besar dan signifikan bagi industri.

Adapun insentif yang masih berlaku meliputi Pajak Kendaraan Bermotor nol persen, Pajak Penjualan atas Barang Mewah nol persen, serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor nol persen sesuai Perpres Nomor 79 Tahun 2023. "Itu dari dulu sampai sekarang masih berlanjut. Jadi insentif yang kami berikan cukup banyak," katanya.

Rachmat memastikan, Pemerintah tidak akan memperpanjang insentif impor CBU karena pasar kendaraan listrik nasional sudah tumbuh signifikan. Stimulus impor tidak lagi dibutuhkan pada fase pengembangan saat ini.

Dia memaparkan, populasi kendaraan listrik meningkat tajam dari sekitar 17 ribu unit pada 2023 menjadi lebih dari 103 ribu unit pada 2025. Pertumbuhan tersebut menunjukkan daya serap pasar yang semakin kuat. Capaian itu memperkuat keyakinan Pemerintah terhadap keberlanjutan industri EV.

"Meski sejumlah insentif telah berakhir, itu tidak mengganggu iklim investasi. Seluruh pabrikan yang masuk Indonesia wajib melanjutkan komitmen investasi dalam negeri," tandasnya. ■ PYB